

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Garner, Bryan. *Black Law Dictionary. Eight Edition*. USA: A Thomson Reuters Business, 2004.
- A. Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. St. Paul: West Publishing Co., 2009.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arif, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Baugus, Brian and Feler Bose, *Sunset Legislation in the State, Balancing the Legislature and the Executive*. Virginia: George Mason University, 2015.
- Burton, Richard dan Wirawan B. Ilyas. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Cotterrell, Roger. *Law, Cculture and Society*. England: Ashgate, 2006.
- Fajar MD, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farida Indrati S, Maria. *Ilmu Perundang Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Cetakan ke-18. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- F. Fuller, Lon. *Moralitas Hukum*. Revisi Edition. CT New Haven: Yale University Press, 1969.
- F. Fuller, Lon. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1973.
- F. Fuller, Lon. *The Morality of Law*. Revised edition, New Haven and London. Massachusetts USA: Yale University Press, 1975.
- Hamidi, Jazim, dkk. (Green Mind Community). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

- Hart, HLA. *Esai dalam Yurisprudensi dan Filsafat*. Clarendon Press, Oxford, 1983.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- HS, Salim dan Erlas Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Isra, Saldi. *Fungsi Legislasi Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Jurnal Hukum Jentera, 2010.
- JLK, Valerine. *Metode Penelitian Hukum*, Kumpulan Materi Kuliah. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel, 1945.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Munawir. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Nazir, Moh. "*Metode Penelitian*". Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- O'Brien, Audrey. *House of Commons Procedure and Practice*. Ottawa: Editions Yvon Blais, Edisi II, 2009.
- Parkin, Michael. *Economics*. Pearson Education. 11th Edition, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- RG, Lipsey, Ragan CTS, dan Storer PA. *Economics*. Pearson International Edition. 13th Edition, 2007.
- Rosdiana, Haula, Edi Slamet Irianto, dan Titi Muswati Putranti. *Teori Pajak Pertambahan Nilai: Kebijakan dan Implementasinya Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Setiyaji dan Amir. *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Esa Unggul*. Jakarta, Edisi November 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sulistiowati, Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2009.
- Sumitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco, 1990.
- Syaukani, Imam & A. Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Wacks, Raymond. *Understanding Jurisprudence, An Introduction to Legal Theory*. Second Edition. New York: Oxford University Press, 2009.
- Watson, Alan. *Legal Transplants, an Approach to Comparative Law*. Athens and London: The University of Georgia Press, 1993.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Cetakan ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang*

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.*

_____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.*

_____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.*

C. Artikel/Jurnal

Beckmann, Franz von Benda., Benda Beckmann, Keebet von; and Griffiths, Anne, “*Mobile People, Mobile Law: An Introduction*”. Dalam Franz von Benda Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths (ed.) *Mobile People, Mobile Law, Expanding Legal Relations in a Contracting World*. England: Ashgate Publishing Limited, 2005.

Budiyono, Tri. *Menggagas Sintesa Global-Lokal Dalam Membangun Ekonomi*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Edisi April-Oktober, 2002.

Dwi Anggono, Bayu. *Asas Materi Muatan yang Tepat dalam Pembentukan Undang-undang, serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012)*. Disertasi Doktor, Universitas Indonesia: Jakarta, 2014.

E. Murray, John. *Introduction to The Morality Of Law*. Villanova Law Review: University Charles Widger School of Law Digital Repository. Vol. 10, Iss.4. Art.2, 1965.

Haryadi, Bambang dan Agus Sari. *Menakar Potensi Penerimaan Negara atas Pajak E-Commerce, Tarik Ulur Regulasi dan Hambatan Penerimaan Pajak: Suatu Kajian Literatur*. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol. 4, No. 3, September 2020.

Hasan, Dahliana. *Penyusunan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Urgensi Penyempurnaannya*. FGD dalam rangka Urgensi Pembentukan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan Keahlian DPR RI: 6 April 2021.

Isra, Saldi. *Fungsi Legislasi Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Jurnal Hukum Jentera, 2010.

Nonet, Philipe dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Dalam A. Ahsin Thohari, “Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4 Desember 2011.

Purwadi, Hari. “Pendekatan Baru Dalam Studi Perbandingan Hukum: Critical Comparative Law dan Transplantasi Hukum di Indonesia”. Dalam IS Susanto & Bernard L Tanya, *Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Schauer, Frederick. *The Politics and Incentives of Legal Transplantations*, CID (Center for International Development: Harvard University. Working Paper Number 44, April 2000.

Sidharta, Arief. *Filsafat Hukum Pancasila*, Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia. Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, Bandung, 2006.

Toruan. “Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law”, 2017.

Waller, Jonathan. *The Expenditure Effects of Sunset Laws in State Governments*. Disertasi Doktor, Clemson University, 2009.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Transplantasi Hukum Ke Negara-negara Yang Tengah Berkembang, Khususnya Indonesia*. Dalam *Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

D. Bunga Rampai

Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta, PSHK, 2019.

Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 Jakarta, 20 Oktober 2019.

Joko Widodo, disampaikan pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024, tanggal 20 Oktober 2019.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tentang Program Legislasi Nasional khususnya mengenai Omnibus Law. Di Badan Legislasi DPR RI pada Senin, 4 November 2019.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, PSHK Sampaikan Masukan Prolegnas dan Omnibus Law, dipublikasi pada 21 November 2019, <https://pshk.or.id/highlight-id/pshk-sampaikan-masukan-prolegnas-dan-omnibus-law/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

Rofiandri, Ronald. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. *Masukan Prolegnas 2020-2024 dan Ulasan Singkat Tentang Omnibus Law*. Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Legislasi DPR RI, tanggal 4 November 2019.

Susanti, Bivitri. Dalam jumpa pers “RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru” Jakarta, 17 November 2020.

Yuliandri Tim Pengkajian Hukum, 2014, Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

E. Internet

Anonim. Menelusuri Asal-usul Konsep Omnibus Law. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law?page=all>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

Arinanto, Satya. Reviving omnibus law: Legal option for better coherence, *Harian Jawa Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-better-coherence.html>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

Duc Manh, Ngo. *Omnibus Law-Making Technique And Its Application to The Works Of The National Assembly*. Dimuat dalam http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/WBI-Training/288464-1139428366112/Session3-NgoDucManh_OMNIBUS_LAW_E_new.pdf. Diakses tanggal 7 November 2019.

Duhaime’s Law Dictionary. *Omnibus Bill Definition*. Dimuat dalam <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>, diakses tanggal 7 November 2019.

Dwi Rafiqi, Ilham. *Hukum dan Moralitas Sebuah Relasi dan Wacana Otentisitas Dalam Konteks Keindonesiaan*, LSF Discourse: Ex Philosophia Claritas. <https://lsfdiscourse.org/hukum-dan-moralitas-sebuah-relasi-dan-wacana-otentisitas-dalam-konteks-keindonesiaan/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

Fahmi, Khairul, Sentralisasi Pembentukan Perda, *Harian Kompas* 21 Oktober 2019, versi elektronik tersedia pada: <https://kompas.id/baca/opini/2019/10/21/sentralisasi-pembentukan-perda/>. Diakses tanggal 11 November 2020.

Hukumonline.com. Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-biladiterapkan-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

Institute of Law Science The World Bank. *Study Paper Possible Use Of The Omnibus Legislative Technique For Implemetation Of Vietnam's WTO*

Obligations And Commitments. Dimuat dalam http://siteresources.worldbank.org/INTVIETNAM/147271-1169742068115/21085744/study_report_omnibus_legal_technique.pdf.. Diakses tanggal 7 November 2019.

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. *Istilah Umum Perpajakan.* <https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan>. Diakses pada tanggal 1 September 2020.

Lararenjana, Edelweis. Mengenal Apa Itu Omnibus Law Beserta Konsep dan Sejarah Perkembangannya, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-apa-itu-omnibus-law-beserta-konsep-dan-sejarah-perkembangannya-kln.html?page=all>, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

OECD. *Red Tape Challenge.* <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/GBR-Red-Tape-Challenge.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

Sahbani, Agus. Permenkumham Harmonisasi Peraturan Dinilai Konflik dengan UU, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdc39c5d3a98/permenkumham-harmonisasiperaturan-dinilai-konflik-dengan-uu/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

Setiadi, Wicipto. *Menggagas Undang-Undang Sapu Jagat.* Dimuat dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1455564/18/menggagas-undang-undang-sapu-jagat-1572886812>. Diakses tanggal 5 November 2019.

Sholikin, M. Nur. Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law. <https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

Yasin, Muhammad. Mengenal Metode Omnibus Law. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law?page=2>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

Yuniarto, Topan., Vincentius Gitiyarko, Ignatius Kristanto, Apa Itu Omnibus Law?. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/apa-itu-omnibus-law>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

Zsazya. *Omnibus Law dan Rencana Penerapannya di Indonesia.* <https://www.online-pajak.com/omnibus-law>. Diakses pada tanggal 1 September 2020.